



Veda Jyotih:

JURNAL AGAMA DAN SAINS

Penerbit: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dosen Hindu Indonesia (DHI) bekerja sama dengan
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA DALAM TEKS ARTHASHASTRA

Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari

Alumni Fakultas Strategi Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan

Email: ayunikkia@gmail.com

Abstract

National defense is a very important aspect in maintaining the existence and sovereignty of a country. Since ancient times Chanakya in his very famous treatise Arthashastra emphasized the importance of diplomacy and efforts to build the strength of a country. This paper aims to examine the text of Arthashastra as the basis for the Defense Diplomacy strategy. Indonesia adopted a Sanskrit slogan in the military world which indicated the close relationship between Indonesia's defense and the rich heritage of Asian civilization with the influence of Indian texts. Chanakya emphasized that the state must build defenses, be ready to go to war but be able to maintain peace. A country is seen as having to be authoritative so that other countries, either with hostile tendencies or as partners, will have high respect. However, Arthashastra emphasized that the highest goal of a country is to build prosperity with defense and security as a prerequisite for building prosperity for a country.

Keywords: Defense, Arthashastra, Chanakya

Abstrak

Pertahanan negara merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga eksistensi maupun kedaulatan suatu negara. Sejak abad kuno Chanakya dalam risalahnya yang sangat terkenal Arthashastra menekankan pentingnya diplomasi dan upaya membangun kekuatan suatu negara. Tulisan ini bertujuan mengkaji teks *Arthashastra* sebagai dasar strategi Diplomasi Pertahanan. Indonesia mengadopsi slogan berbahasa Sanskerta dalam dunia militer yang mengindikasikan dekatnya hubungan pertahanan Indonesia dan

khazanah peradaban Asia yang kental dengan pengaruh teks India. Chanakya menegaskan, negara harus membangun pertahanan, siap berperang namun dapat memelihara perdamaian. Sebuah negara dipandang harus berwibawa sehingga negara lain baik dengan kecenderungan bermusuhan maupun sebagai mitra, akan menaruh hormat yang tinggi. Namun demikian, Arthashastra menegaskan tujuan tertinggi sebuah negara adalah membangun kesejahteraan dengan pertahanan dan keamanan sebagai prasyarat membangun kemakmuran bagi sebuah negara.

Kata kunci: Pertahanan, Arthashastra, Chanakya

1. Pendahuluan

Diplomasi Pertahanan Negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Pertahanan negara sudah merupakan kebutuhan atas negara sejak jaman lampau yang dibuktikan dengan sejumlah teks yang disusun untuk tujuan tersebut. Di Asia, teks yang sangat berpengaruh yakni *Arthashastra* yang ditulis oleh Chanakya. *Arthashastra* disusun oleh Chanakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. *Arthashastra* karya Chanakya terdiri atas 32 bagian, 15 *adikarana* dengan 150 bab dan 600 *sloka*. Dengan demikian *Arthashastra* dapat pula dikatakan sebagai sebuah kompendium tentang bagaimana mengelola suatu Negara secara lengkap dan detail. Atas karya yang begitu monumental ini, Chanakya dianggap sebagai tokoh politik Hindu yang legendaris, yang kejeniusannya sering disepadankan dengan para filsuf dan negarawan barat seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.

Penggalian dan interpretasi lebih mendalam membuat *Arthashastra* menemukan relevansinya ditengah perubahan jaman yang kian dinamis saat ini. Pemikiran-pemikiran Chanakya dalam *Arthashastra* jika diinterpretasikan secara harfiah mungkin akan terlihat ketinggalan jaman dan tidak lagi relevan. Namun jika interpretasinya

disesuaikan dengan perkembangan saat ini keadaannya masih dapat dikatakan relevan. Misalkan mengenai teori mandala para pemikir barat hanya menekankan bahwa “setiap negara tetangga adalah musuh, dan musuh dari musuhmu adalah temanmu” (Rangarajan, 1992). Jika dilihat dari pengertian ini semata, maka teori mandala Chanakya akan terlihat begitu realis dan sulit untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini menjadi kontradiktif dengan rezim regionalisme yang secara tidak langsung menuntut negara-negara yang bertetangga untuk bekerjasama (*cooperate*) satu sama lain demi tujuan bersama. Bahkan saat ini sebuah negara akan sulit bahkan sangat jarang menunjukkan kondisi yang bermusuhan secara langsung dan terang-terangan dengan negara tetangga mereka.

Sementara itu, R.P Kangle menegaskan bahwa Chanakya sesungguhnya tidak memukul rata seluruh negara yang menjadi tetangga adalah musuh. Hal ini dibahas pada buku ketujuh, bab 18 sutra ke-29, bahwa “Para pangeran negara tetangga, *samantas*, biasanya dianggap bermusuhan. Tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki perasaan ramah terhadap *vijigisu* (negara tengah), sementara yang lain mungkin bahkan tunduk padanya. Negara-negara tetangga terbagi ke dalam tiga kategori; *Aribhavin*

(dari disposisi bermusuhan), *mitrabhavin* (dari disposisi ramah) dan *bhrytyabhavin* (dari disposisi persaudaraan)” (Kangle, 1986). Dilihat dari penyampaian tersebut maka sesungguhnya sebuah negara perlu memetakan cara yang akan dipakai untuk menghadapi negara-negara tetangganya. Bagaimana negara memetakan negara-negara sebagai kompetitor untuk digalang dalam kerjasama, mana yang perlu diberikan perhatian khusus. Serta mana yang berpotensi memberi ancaman laten, mana yang berpotensi memberikan keuntungan bersama.

Politik menjadi diskursus yang sangat menarik dalam peradaban Veda. Bahkan Kautilya sebagai ahli politik Hindu merupakan seorang professor pada universitas tertua di dunia yakni Taxila atau Taxila (Surpi, 2021). Ilmu politik menjadi salah satu kursus unggulan pada universitas Hindu di masa lampau. Sebab disadari politik dan tata negara adalah modal dasar dalam membangun peradaban bagi umat manusia. Dalam Arthashastra, Kautilya menawarkan diskusi yang luas dan benar-benar menarik mengenai perang dan diplomasi. Chanakya dalam Arthashastranya mengulas tentang dinamika kebijakan moneter dan fiskal dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, hubungan internasional, serta strategi perang. Menurut Kautilya, jika sebuah Negara ingin memiliki kekuasaan dalam hubungan dengan negara lain, ingin memenangkan perang, maka Negara tersebut harus memiliki ekonomi yang kuat. Chanakya juga memberikan penekanan pada sosok pemimpin yang energik dan dinamis yang dibutuhkan suatu negara untuk meningkatkan kharisma dan pengaruh negara itu. Karena jika pemimpinnya energik, rakyat dan ekonominya juga akan bergeliat, sementara jika pemimpinnya ma-

las dan lamban, hal yang sama akan terjadi pada negara.

Meskipun telah diakui sebagai salah satu buku yang memberikan pemahaman terhadap diplomasi dan pertahanan Negara, namun sampai saat ini belum banyak penstudi di Indonesia baik itu para penstudi ilmu politik maupun penstudi ilmu hubungan internasional yang membahas dan mengenal baik konsep-konsep *Arthashastra*. Bahkan nyaris tidak ada buku teks Hubungan Internasional berbahasa Indonesia yang menyinggung Kautilya *Arthashastra* dalam fokus bahasannya. Kebanyakan buku teks hubungan internasional di Indonesia hanya berfokus pada kajian-kajian hubungan internasional dengan perspektif barat. Demikian halnya dengan konsep konsep mengenai diplomasi dan pertahanan negara di Indonesia terasa masih begitu *western oriented*. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa dominasi teori barat dalam ilmu hubungan internasional maupun diplomasi pertahanan mengandung bias teoretis karena faktor nilai budaya yang berbeda dengan keadaan di Indonesia

Padahal jika diamati lebih jauh pendekatan yang digunakan dalam Sistem Pertahanan Indonesia pun tidak selalu berkiblat kepada teori-teori barat. Sistem pertahanan yang diterapkan TNI di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan falsafah Jawa Kuna dalam manajemen serta praktik kepemimpinan pada masa awal pembentukan TNI di Indonesia memberikan warna tersendiri pada militer di Indonesia. Pada masa Presiden Soeharto misalnya, falsafah Jawa Kuno seperti “*Hasta Brata*” yang di padukan dengan *Sapta Marga* menjadi patokan kepemimpinan. Demikian halnya dengan penggunaan terminologi-terminologi berbahasa Sansekerta (yang diadopsi dengan penulisan Jawa Kuno)

pada Doktrin Pertahanan Militer serta doktrin yang berlaku di masing-masing matra TNI. Doktrin Pertahanan Militer Indonesia adalah *Tri Dharma Eka Karma*, yang dijabarkan ke dalam tiga matra yaitu, Doktrin Pertahanan Militer Matra Darat “*Doktrin Kartika Eka Paksi*”, Doktrin Pertahanan Militer Matra Laut “*Jalesveva Jayamahe*” dan Doktrin Pertahanan Militer Matra Udara “*Swa Bhavana Paksa*” Doktrin. Hal ini membuat penulis ingin meneliti lebih jauh kemungkinan fusi ataupun asimilasi nilai-nilai dari pustaka-pustaka yang berasal dari India, dalam hal ini *Arthashastra* untuk dapat dijadikan paradigma dalam melakukan strategi Diplomasi pertahanan. Penulis ingin melihat bagaimana nilai-nilai serta konsep yang terkandung pada teks *Arthashastra* dapat menjadi dasar pada konsep diplomasi pertahanan, khususnya dalam konteks diplomasi pertahanan negara Republik Indonesia.

Politik, tata pemerintahan dan pertahanan negara, dalam Hindu merupakan bagian dari tugas agung para Ksatria. Sri Krishna dalam Bhagavad Gita melukiskan sifat-sifat seorang ksatria, yakni;

*śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ yuddhe
cāpy apalāyanam
dānam iśvara-bhāvaś ca kṣātram
karma svabhāva-jam*

(Bhagavad Gita XVIII.43)

“Kepahlawanan/Keberanian, kewibawaan, ketabahan hati, pandai melihat keadaan, keberanian di medan perang, kedermawanan dan kepemimpinan adalah sifat-sifat dan pekerjaan yang alami bagi para *kṣatriya*.” (Srimad Bhagavad Gita Bhasya Sri Sankaracarya, 2011).

Keberanian, Kepahlawanan, kewibawaan, ketabahan hati, pandai memanfaatkan keadaan, kehebatan di medan perang, kedermawanan dan kepemimpinan merupakan kualifikasi bagi para pemimpin dan kaum *kṣatriya* yang bertugas melindungi dan mengatur negara. Dua kualifikasi penting bahwa *kṣatriya* memiliki harga diri dan tidak lari dari medan perang. Peran ini hendaknya diambil bagi mereka yang lahir berwatak dan bermental Ksatria.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian teks yang mengkaji nilai-nilai dan gagasan mengenai statecraft, pemetaan ancaman, dan diplomasi yang terdapat dalam teks *Arthashastra*. Dimana ketiga konsep yang disebutkan diatas akan menjadi benang merah yang memberikan hubungan intrateks mengenai konsep diplomasi pertahanan dalam *Arthashastra*. Sehingga kemudian didapatkan output berupa konsep diplomasi pertahanan menurut *Arthashastra* yang dapat dijadikan rujukan paradigma serta konsep diplomasi pertahanan non-barat dalam menjalankan strategi diplomasi pertahanan. Sumber data utama dari penelitian ini adalah Teks *Arthashastra* dan data pendukung di dapat dari kajian, komentar serta interpretasi ahli mengenai konsep yang terdapat dalam *Arthashastra* dalam bentuk buku, jurnal, disertasi ataupun tulisan ilmiah lainnya. Data pendukung lainnya didapatkan pula dari hasil wawancara dengan para pakar atau ahli dalam bidang *Arthashastra* dan Pertahanan Negara. Penelitian ini akan difokuskan kepada bagaimana nilai-nilai diplomasi dalam *Arthashastra* dapat dijadikan dasar dalam menjalankan diplomasi pertahanan yang tidak hanya berlandaskan teori-teori barat.

Pengkajian ini menggunakan Teori Interpretasi Paul Ricoeur. Dalam teori yang dibangunnya, Paul Ricoeur berupaya menjembatani problem wacana yang telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan sudah menjadi persoalan oleh Plato dan Aristoteles. Ricoeur memulai pembahasannya dengan tema bahasa sebagai wacana. Dikatakan oleh Ricoeur (Ricoeur, 2012) inilah konteks pertama dimana konsep wacana diketahui, bahwa kesalahan dan kebenaran merupakan afeksi wacana dan wacana menghajatkan dua tanda dasar, satu kata benda dan satu kata kerja yang saling berhubungan dalam bentuk sintetis (yang bermakna) di balik kata-kata tersebut. Lebih lanjut dinyatakan Ricoeur (2012:19) dalam linguistik modern ini, problem wacana menjadi suatu hal yang orisinal dikarenakan dewasa ini wacana dapat dipertentangkan dengan suatu terma kontradiktif yang tidak dikenal atau tidak dijustifikasi para filosof kuno.

3. Hasil dan Pembahasan

Chanakya atau Kautilya memiliki pemikiran realis, diplomasi merupakan senjata lain yang digunakan dalam peperangan berkepanjangan yang selalu terjadi ataupun direncanakan akan terjadi (*Diplomacy was just another weapon used in the prolonged warfare that was always either occurring or being planned for*). Hal ini disebabkan karena Chanakya berasumsi bahwa negara itu hidup pada dunia hubungan internasional dimana hanya ada dua pilihan, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Sehingga ia tidak lagi mengatakan “bersiaplah berperang namun tetap mengharapkan perdamaian.” Justru Chanakya menyatakan sebaliknya, “bersiaplah untuk berperang dan berencanalah untuk menaklukkan”. Ketika Carl Von Clausewitz menyatakan bahwa

perang hanyalah perpanjangan dari politik domestik, Chanakya justru berpendapat bahwa diplomasi merupakan tindakan perang yang halus, serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh dan mendapatkan keuntungan bagi negara itu sendiri, segalanya dilakukan dengan mata menuju upaya penaklukkan.

“In this way, the conqueror should establish in the rear and in front, a circle (of kings) in his own interest. ... And in the entire circle, he should ever station envoys and secret agents, becoming a friend of the rivals, maintaining secrecy when striking again and again. The affairs of one, who cannot maintain secrecy, ... undoubtedly perish, like a broken boat in the ocean.” (Kangle, 1986)

Bagi Chanakya kebijakan luar negeri hanyalah perpanjangan perang dari sebuah negara. Karena tujuan dari kebijakan luar negeri bukanlah untuk menghentikan perang, namun lebih kepada upaya guna menangkis kekalahan dan memastikan keberhasilannya dalam peperangan berikutnya. Bagi Chanakya, prinsip kebijakan luar negeri ini - bahwa negara-negara bertindak dalam kepentingan politik, ekonomi, dan militer mereka - adalah kebenaran abadi dari ilmu politiknya, atau artasastra. Dia tidak percaya bahwa negara-negara tidak pernah bertindak dengan cara yang altruistik - memang, Chanakya menganjurkan tindakan kemanusiaan yang juga bertepatan dengan kepentingan pribadi - tetapi ia percaya bahwa seseorang harus berasumsi, jika dipercayakan dengan kekuatan politik atau militer, bahwa tetangganya pada akhirnya akan bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

Terkait dengan Diplomasi dan Kebijakan luar negeri, Chanakya mencetuskan teori *Shadgunya* atau yang lebih dikenal dengan Six-fold Foreign Policy atau enam metode kebijakan politik luar negeri. Enam kebijakan politik luar negeri Kautilya merupakan penentuan (kebijakan) mundur, stabil/berdiam diri dan maju. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*sandhi*), melakukan peperangan (*vigraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang/siaga (*yana*), mencari dukungan/alianasi (*samsraya*), dan kebijakan ganda yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya (N. N. A. N. Avalokitesvari et al., 2018). Kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan.

Untuk mengadakan perdamaian, kita harus terlibat dulu dalam suatu kesepakatan, seperti misalnya perjanjian, dengan syarat-syarat tertentu. Namun dalam perjanjian ada yang mengharuskan syarat tertentu, atau bisa juga tidak memiliki kewajiban apapun. Perjanjian tanpa syarat umumnya digunakan untuk memperoleh informasi tentang musuh, sehingga raja bisa melakukan serangan setelah mempelajari titik lemah ‘lawan-lawannya’. Perjanjian dengan kewajiban tertentu memungkinkan seorang “raja bijaksana membuat raja negara tetangga memerangi negara tetangga lainnya untuk mencegah mereka bersatu dan menyerang”. Satu-satunya cara raja agar benar-benar mengadakan perdamaian adalah ketika ia menemukan dirinya dalam suatu kemunduran relatif jika dibandingkan dengan musuhnya (N. N. N. Avalokitesvari & Midhio, 2021).

Studi tentang elit dan pemimpin politik merupakan salah satu pilar penting dalam ilmu politik. *Statecraft* sendiri merupakan sebuah kerangka kerja untuk mempelajari tentang hal tersebut, yang dikembangkan pertama kali oleh Jim Bupitt, seorang akademisi dari Inggris pada tahun 1986. Pendekatan kenegaraan/ *statecraft* berkaitan dengan bagaimana elit politik menghadapi, menanggapi dan mengatur tantangan yang muncul. Dr. John Lenczowski, *Founder and President of The Institute of World Politics* (IWP) menyatakan bahwa *statecraft* merupakan seni dalam menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan membela kepentingan nasional yang vital (*Vital national interest*), melancarkan hubungan internasional, dan akhirnya menjadi penyebab perdamaian di dunia. Berbagai instrument yang termasuk kedalamnya antara lain strategi militer, seni diplomasi, berbagai jenis diplomasi publik yang melibatkan hubungan dengan orang-orang dan juga dengan pengaruh asing sebagai lawan dari diplomasi tradisional yang melibatkan hubungan dengan para penguasa. Seni *statecraft* lainnya termasuk intelejen dan kontra intelejen (Karad, 2015).

Bagi Machiavelli, *statecraft* merupakan sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang negarawan. *Statecraft* ini terkait pula dengan cara ia menggunakan kekuasaan yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang lebih besar (tujuan negara). Machiavelli menyatakan bahwa negara yang jaya dan besar merupakan negara yang disegani oleh banyak negara-negara lainnya. Disegani merujuk pada artian dihormati dan ditakuti namun sekaligus dapat dimintai bantuan perlindungan. Untuk mencapai hal tersebut

1 Butterfield, Herbert. *The Statecraft of Machiavelli*. New York: Collier Books, 1967

negara harus memiliki tentara yang kuat yang dibentuk dari rakyatnya sendiri melalui pelatihan wajib militer. Negara yang kuat dan jaya juga wajib memiliki penguasa yang cakap dan cerdas sehingga bisa mempertahankan kekuasaannya dari konspirasi maupun usaha-usaha kudeta baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dilakukan dengan bantuan asing. Hal terpenting lainnya adalah sang penguasa ini harus memiliki rakyat yang taat pada penguasa dan siap membela negara dan penguasa dari berbagai jenis ancaman yang membahayakan eksistensi yang penguasa dan negara mereka.¹

Sementara itu, seni kenegaraan atau *statecraft* Indonesia pada jaman kerajaan dulu banyak dibahas dalam karya “Negara dan Usaha Bina Negara di Masa Lampau” karya Soemarsaid Moertono. Hubungan antara rakyat dan raja/penguasa disini disebut sebagai *kawulo lan gusti*. Seorang raja tanpa ada rakyat maka kekuasaan yang dimiliki jadi tak berguna. Raja hendaknya memiliki sifat bijaksana agar disegani oleh rakyat. Sifat bijaksana mencakup perilaku adil dalam penyelesaian masalah, serta bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpin. Sifat lain yang harus dimiliki pemimpin itu juga tertanam dalam konsep *astabrata*. *Bangsawan/ Priyayi* juga memiliki peranan yang penting dalam tata negara di kerajaan jaman mataram yang dijadikan bahan pembahasan oleh Moertono. Kaum *priyayi* merupakan kaki tangan raja. Mereka bertugas mengurus semua kondisi dalam suatu wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan pada masa konsep pemerintahan ini terbagi menjadi dua,

Negaragung dan *mancanegara*. Daerah *mancanegara* ini dipimpin oleh seorang bupati, yang merupakan abdi dari Raja, dan harus tunduk pada perintah raja².

Terkait dengan upaya mendapat atau memperluas wilayah raja memiliki tiga jenis cara. Pertama adalah dengan melakukan kekerasan atau peperangan. Kedua adalah dengan cara memaksa orang yang berpengaruh pada wilayah tertentu (yang akan dikuasai) untuk tinggal dalam istana dalam jangka waktu tertentu sementara wilayahnya dibiarkan diurus oleh pejabat keraton. Sedangkan cara terakhir adalah dengan menjalin persekutuan melalui perkawinan (Surpi, 2019).

Di sisi lain, dalam *Arthashastra*, tata pemerintahan tercakup ke dalam teori yang disebut sebagai *Teori Saptanga*. *Sapta* dalam Bahasa Sansekerta berarti tujuh dan *anga* berarti bagian-bagian tubuh. Maka *saptanga* merujuk pada pengertian tujuh bagian tubuh. Negara dalam *Artashastra* dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagian tubuhnya³. Tujuh bagian ini antara lain: *Swamin* (*Ruler*; Raja/Penguasa/Pemimpin negara); *Amatya* (*concilors/anggota dewan/mereka yang mewakili institusi negara*); *Janapada* (*Territory/resources/sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk*); *Durg* (*Well-fortified Sovereign entity/ entitas berdaulat yang dibentengi*); *Kosa* (*Treasury/ Perbendaharaan*); *Danda/ Bala* (*Military/ Army and order keeping/ Militer dan penjagaan ketertiban*); dan *Mitra* (*Friend/ Ally/ teman dan sekutu negara*) (Dellios, 2003). (Surpi et al., 2021)

2 Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, abad XVI sampai XIX. Yayasan Obor Indonesia.

3 Sukra, *Sukraniti*, Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass, 2012, chapter 1, sutra 62

Sebagai bagian tubuh, ketujuh elemen ini tidak dapat terpisahkan dan dibutuhkan untuk pertumbuhan negara secara menyeluruh. Setiap bagian tersebut memainkan peranan yang penting. Secara umum urutan kepentingannya bersifat menurun dalam artian *Swamin* lebih penting dari *amatya*, lalu *janapada*, *durg*, *kosa*, *bala*, lalu terakhir *mitra*. Namun dalam kenyataannya urutan ini tidak terlalu penting, terlebih jika negara dihadapkan terhadap ancaman tertentu, urutan ini bisa berubah secara dinamis. Karena bagi Chanakya kehati-hatian lebih penting dari aturan. Dia tidak menganggap remeh apapun. Sehingga ia menulis “*[Lastly] a calamity which threatens to destroy all other elements shall be considered as [the most] serious, irrespective of what position the element occupies in the list of priorities*” (Gonda & Kangle, 1967).

Statecraft dalam Arthashastra ditujukan untuk mencapai apa yang disebut sebagai *yogakshema* yang berarti menikmati kedamaian yang didapat dari kesejahteraan/ kemakmuran, yaitu menikmati kesejahteraan serta keamanan bersamaan. Menurut Kautilya, negara yang tidak aman dapat ditaklukkan dengan mudah, dan dengan demikian akan berada di bawah kekuasaan penguasa asing dan menghadapi eksploitasi. Kautilya percaya bahwa keamanan nasional sangat penting untuk kemakmuran dan memiliki pasukan yang baik merupakan faktor penting dalam penyediaan keamanan nasional. Dia juga memahami bahwa kemakmuran sangat penting untuk keamanan nasional karena negara miskin tidak dapat memiliki sumber daya untuk mempertahankan keamanannya. Dengan demikian, ia percaya bahwa kemakmuran dan keamanan nasional saling bergantung (Boesche, 2003).

Cāṇakya memimpikan tingkat pencapaian sebuah negara dalam hal ideologi, pembangunan sosial dan ekonomi, sebagai berikut:

- 1) Perekonomian mandiri yang tidak bergantung pada perdagangan luar negeri;
- 2) Masyarakat egaliter di mana ada kesempatan yang sama untuk semua;
- 3) Pembentukan koloni baru untuk peningkatan sumber daya. *Cāṇakya* juga menganjurkan pengembangan koloni yang sudah dianeksasi. Pandangan imperialistiknya dapat diartikan sebagai pengembangan sumber daya alam dan buatan manusia;
- 4) Menurut *Cāṇakya*, pengelolaan lahan yang efisien sangat penting untuk pengembangan sumber daya. Sangat penting bagi negara untuk mengawasi pendudukan lahan berlebih oleh tuan tanah dan penggunaan tanah yang tidak sah. Idealnya negara harus memantau sumber daya yang paling penting dan vital (dalam hal ini tanah);
- 5) Negara harus menjaga pertanian setiap saat. Perangkat pemerintah harus diarahkan pada pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk mendukung dan memelihara berbagai proses, mulai dari penaburan benih hingga panen;
- 6) Bangsa ini harus membayangkan untuk membangun benteng dan kota. Kompleks ini akan melindungi negara dari invasi dan memberikan keamanan internal. Kota-kota akan bertindak sebagai pasar raksasa yang meningkatkan pendapatan negara;
- 7) Perdagangan internal lebih penting bagi *Cāṇakya* daripada perdagangan eksternal. Di setiap titik masuknya barang, sejumlah pajak minimal harus dikumpulkan. Negara harus memungut

pajak pada tingkat minimal, sehingga tidak ada peluang penggelapan pajak;

- 8) Hukum negara harus sama untuk semua, terlepas dari orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Perempuan miskin harus dilindungi oleh masyarakat karena mereka adalah korban eksploitasi sosial dan perilaku kasar laki-laki;
- 9) Keamanan warga pada masa damai sangat penting karena negara adalah satu-satunya penyelamat bagi laki-laki dan perempuan yang terkena dampak hanya karena kelalaian negara. Elemen antisosial harus terus diawasi bersama dengan mata-mata yang dapat memasuki negara itu kapan saja; dan
- 10) *Cāṇakya* membayangkan sebuah masyarakat di mana orang-orang tidak mengejar kesenangan materi. Kontrol atas organ-organ indera sangat penting untuk sukses dalam setiap usaha. Perkembangan spiritual sangat penting untuk kekuatan dan karakter internal individu. Kesenangan dan prestasi material selalu menjadi nomor dua bagi perkembangan spiritual masyarakat dan negara pada umumnya (Das & Singh, 2012).

Menurut Chanakya demi kepentingan kemakmuran negara, seorang raja harus waspada dalam meramalkan kemungkinan bencana, mencoba untuk mencegahnya sebelum mereka muncul, mengatasi yang terjadi, menghapus semua penghalang untuk kegiatan ekonomi dan mencegah hilangnya pendapatan. Berbicara tentang kekuasaan suatu negara, atau "kekuatan nasional" dengan kata lain, Kautilya *Arthashastra* mengidentifikasi tiga *shaktis*: *utsahashakti*, *prabhavashakti* dan *mantrashakti*. *Utsahashakti* berarti kekuatan untuk mem-

berikan dorongan, energi, dan arah kepada negara dan unsur-unsurnya, dan terutama berhubungan dengan penguasa atau raja. Di zaman modern, bisa disamakan dengan kepemimpinan suatu negara. *Prabhavashakti* berarti kekuatan untuk menghasilkan 'efek' yang menguntungkan negara, dan berkaitan dengan ekonomi dan kekuatan militer suatu negara. Akhirnya, *mantrashakti* berarti kekuatan untuk mempengaruhi, menarik, dan mendorong kooping. Dalam pengertian kontemporer, hal ini berkaitan dengan nasihat dan diplomasi yang baik

Dalam *Arthashastra*, ada enam kebijakan politik luar negeri dibahas dalam buku ketujuh (Chati et al., 2018a). Dalam buku ini Kautilya menawarkan teori bahwa “*an immediate neighbouring state is an enemy and a neighbour's neighbour, separated from oneself by the intervening enemy, is a friend*”. Mengapa Kautilya menganggap wilayah Negara yang berdekatan secara langsung adalah musuh, sementara yang berjauhan adalah kawan. Untuk menjelaskannya Kautilya membuat cara pandang yang disebut teori Mandala, di mana negara tetangga yang berdekatan dianggap sebagai musuh/ kompetitor alami, tetapi negara manapun yang wilayahnya dihalangi oleh negara musuh/ kompetitor dianggap sebagai sekutu, atau, musuh dari musuh saya adalah teman bagi saya.

Kautilya meletakkan prinsip dasar dalam sejumlah cara yang berbeda, tetapi yang paling sederhana adalah, “Sebuah negara yang wilayahnya berdekatan langsung adalah musuh alamiah.” Lalu ia menyatakan teori kebijakan luar negeri Mandala dengan lebih detail: “Sehubungan dengan keberadaan raja tengah [yaitu dirinya sendiri], maka elemen/raja ketiga

dan kelima adalah elemen yang bersahabat. Sementara, elemen keempat, dan keenam adalah elemen yang tidak bersahabat." Dengan demikian negara penakluk dapat mempengaruhi garis batas antara sekutu dan musuh, seperti halnya raja penakluk mempengaruhi perbedaan jenis sekutu dan musuh.

Kautilya menggambarkan Mandala atau Lingkaran Negara-negara (*Circle of States*) seperti sebuah roda dengan penakluk sebagai sentralnya. Sekutu-sekutunya ditarik menuju posisinya di sepanjang jari-jari roda meskipun mereka dipisahkan oleh wilayah musuh (Surpi et al., 2020). Ketika dianggap tepat, raja penakluk menerapkan enam metode kebijakan luar negeri, yang umumnya dikenal sebagai enam kebijakan politik (*the six-fold policy*), terhadap berbagai komponen dalam Mandala Negara-negaranya. Metode tersebut bekerja saling terkait dan mengikat satu sama lain kepada penakluknya sehingga ia (raja penakluk) dapat melakukan apapun yang diinginkan selama itu perlu menurutnya. Enam kebijakan politik luar negeri Kautilya merupakan penentuan (kebijakan) mundur, stabil/ berdiam diri dan maju.

Mandala Theory – The Circle of State Theory, menjabarkan konstelasi geopolitik dari sebuah negara. Teori Mandala ini menyertakan setidaknya 12 kategori negara dalam lingkaran negara/ *circle of a state*. Pertama, *vijigīṣu* (*the would be conqueror*) atau negara yang berhasrat untuk menaklukkan negara lain. Kedua, *ari* (*enemy*) musuh utama negara penakluk. Ketiga, *mitra* (*the vijigīṣu's ally*) sekutu dari sang *vijigīṣu*. Keempat, *arimitra* (*ally of enemy*) sekutu dari musuh. Kelima,

mitramitra (*friend of ally*) kawan dari sekutu sang *vijigīṣu*. Keenam, *arimitramitra* (*ally of enemy's friend*) kawan dari sekutu sang musuh. Ketujuh, *parasnigraha* (*enemy in the rear of the vijigīṣu*) musuh di garis belakang sang *vijigīṣu*. Kedelapan, *akranda* (*vijigīṣu's ally in the rear*) sekutu dari sang *vijigīṣu* di garis belakang. Kesembilan, *parasnigrahasara* (*ally of parasnigraha*) sekutu dari musuh di garis belakang sang *vijigīṣu*. Kesepuluh, *akrandasara* (*ally of akranda*) sekutu dari akranda. Kesebelas, *madhyama* (*middle king bordering both vijigīṣu and the ari*) negara tengah yang berbatasan dengan *vijigīṣu* serta *aria tau* musuh. Sementara itu yang keduabelas, *udasina* (*lying outside, indifferent/ neutral, more powerful than vijigīṣu, ari and madhyami*) negara netral/ acuh tak acuh, berada diluar dari lingkaran, biasanya lebih kuat dari *vijigīṣu*, *ari*, dan juga *madhyami*.

Konstelasi Geopolitik ini lebih merupakan bentuk simbolis dan kepercayaan diri yang dibangun oleh sebuah negara. Nyatanya, sangat memungkinkan terbentuknya mandala yang saling tumpang tindih antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Dalam konstelasi geopolitik ini tidak serta merta kemudian secara harfiah menyatakan bahwa sang *vijigīṣu* atau negara yang berniat untuk menaklukkan menjadi pusat dari negara-negara lainnya. Konstelasi geografis ini bersifat dinamis, di mana negara tetangga bisa saja bermusuhan, ramah atau bersifat hubungan vasal (negara bawahan) (Gonda & Kangle, 1967).

Roger Boesche (2003) melalui tulisannya yang berjudul *Kautilya's Arthashastra on War and Diplomacy in Ancient India* menjabarkan sebuah diskusi mengenai pe-

4 Boesche, Roger. 2003. Kautilya's Arthashastra on War and Diplomacy in Ancient India. The Journal of Military History, Vol. 67 No.1 January 2003. Hal. 9-37

rang dan diplomasi menurut Chanakya. Tulisan yang diterbitkan dalam *The Journal of Military History*, Vol. 67 No. 1, January 2003, halaman 9-37 ini menyajikan analisis Chanakya tentang kerajaan mana yang merupakan musuh dan sekutu alami sebuah negara, doktrin mengenai perang rahasia (*silent war*), penggunaan agen rahasia yang dapat membunuh pemimpin musuh dan menebarkan perselisihan diantara musuh itu, pandangan tentang perempuan sebagai senjata perang, memperkuat pasukan untuk mendemoralisasi tentara musuh, penyebaran disinformasi, serta perlakuan yang manusiawi terhadap prajurit dan subyek yang telah ditaklukkan⁴. Pengetahuan ini akan sangat berguna bagi referensi pertahanan di Indonesia sekaligus meningkatkan kewaspadaan. Di jaman ini *silent war* lebih dipilih guna menghancurkan suatu peradaban, sehingga Indonesia harus mewaspadaai dan menemukan cara menghadapinya. *Arthashastra* menjadi referensi yang kuat guna menghadapi perang rahasia yang telah lama terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Liutennant Colonel Malay Mishra (2017) melalui tulisannya berjudul “*Unique Approach to Comprehensive National Power through the Lens of Kautilya’s Arthashastra*” memberikan penjelasan mengenai Kekuatan Nasional yang komprehensif dari sebuah negara. Tulisan yang diterbitkan dalam *Journal of the United Service Institution of India* Vol. CXLVII, No. 607. January-March 2017 ini juga memberikan perbandingan pandangan mengenai formulasi kekuatan nasional yang komprehensif dari baik dari konstruksi western, Chinese, serta dari *Arthashastra*. Mishra juga menjabarkan mengenai *Sap-*

tanga Theory State, sebuah pandangan dari Chanakya mengenai bagaimana negara seharusnya (*Ideal State*) yang kemudian dijalankan dengan *Six Foreign Policies (Shadgunya)*⁵. Indonesia perlu memandang serius *Shadgunya* guna membangun formasi kekuatan nasionalnya.

Major Abhishek Kumar (2016), melalui tulisannya berjudul “*The Arthashastra: Assessing the Contemporary Relevance of an Ancient Indian Treatise on Statescraft*” berupaya menjabarkan mengenai karya *statescraft* dan relevansi nya dengan keaaan saat ini. Thesis dari *Faculty of U.S Army Command and General Staff College* ini menemukan bahwa prioritas Chanakya terhadap unsur-unsur kekuatan nasional negara dan fokusnya pada penigkatan kekuatan negara, menemukan kesamaan dalam pilihan kebijakan China kontemporer. Tulisan ini juga menjabarkna mengenai analisis lingkungan geopolitik kontemporer tiongkok dalam doktrin kautilya. Tulisan ini juga menjelaskan bahwa Konsep-konsep Kautilya tentang Prakrti (elemen-elemen konstituen negara), model kekuatan relatif, dan konsep Vyasana (malapetaka yang mempengaruhi unsur-unsur konstituen negara) menawarkan jalan yang layak untuk mengoptimalkan kekuatan nasional suatu negara (Chati *et al.*, 2018b).

Konsep-konsep pertahanan dalam *Arthashastra* sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia guna membangun kekuatan negara dengan kedaulatan negara serta disegani di dunia. Demikian pula, dalam *Arthashastra*, segala bentuk pertahanan negara sesungguhnya bermuara pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan tertinggi. Namun demikian, berbagai aspek pertahan-

5 Mishra, Malay. 2017. *Journal of the United Service Institution of India*, Vol. CXLVII No. 607, January-March 2017

an masih terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Pemikiran-pemikiran tentang moral politik maupun tujuan politik sangat penting untuk direvitalisasi di Indonesia mengingat telah terjadi pertarungan yang tidak sehat dan munculnya politik identitas di Indonesia. Hal ini bisa mengancam keutuhan bangsa. Kautilya sejak jaman lampau mengajarkan bahwa tujuan politik adalah demi kesejahteraan masyarakat dan harus dilakukan dengan standar moral tertinggi (Surpi, 2019).

Sebagaimana digambarkan dalam *Mahabharata*, *Ksatria* bahkan mampu mengubah situasi yang buruk, keadaan yang kurang beruntung menjadi sejahtera dan berkelimpahan. Pandawa mengubah daratan tandus dan kering dengan nama *Kaṇḍavaprastha* dengan kecekatan, kerja keras dan memohon dukungan serta bantuan para Dewa, menjadi Indraprastha yang sejahtera dan makmur. Inilah tugas total ksatriya dimana ia harus mampu mengubah suatu wilayah yang kering dan tandus sekali pun menjadi wilayah yang subur dan mensejahterakan masyarakat. Demikian pula keahlian diplomasi dapat dipelajari demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pertahanan negara dan pengembangan ilmu pertahanan.

4. Simpulan

Diplomasi Pertahanan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Chanakya, ahli tata negara India Kuno yang menulis risalah terkenal *Arthashastra* telah merumuskan sejumlah konsep dan strategi pertahanan. Kebijakan luar negeri, dikenal sebagai enam kebijakan politik (*the six-fold policy*), yang berkaitan dengan komponen

Mandala sebuah negara. Teori mandala yang dibangun oleh Kautilya atau *Cāṇakya*, digunakan secara luas untuk membangun kerajaan Maurya dan pengetahuan itu ditulis dalam risalahnya yang terkenal yakni *Arthashastra*. Demi masa depan Indonesia, teori mandala harus memperkuat konsep geopolitik dan geostrategi. Demikian pula teori-teori lainnya dalam *Arthashastra* hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pertahanan dan pengelolaan negara. Pelibatan kader intelektual bela negara di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Namun upaya yang sungguh-sungguh harus dibangun oleh semua pihak demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, walau tidak mengadopsi secara utuh seni pertahanan Chanakya, namun mendapat pengaruh yang besar dari India melalui sejumlah teks seperti *Ramayana* dan *Mahabharata*, khususnya di bidang kepemimpinan dan kekuatan militer. Chanakya dalam risalah terkenalnya *Arthashastra* tidak hanya berbicara soal pertahanan dan perang, tetapi tujuan tertingginya adalah kesejahteraan. Negara yang sejahtera justru akan mampu membangun aspek pertahanan yang sangat kuat di mana rakyat merupakan elemen kekuatan yang sangat penting. Olehnya di masa kini pembelajaran berbagai aspek dari teks *Arthashastra* di kalangan Hindu sesungguhnya memiliki urgensi yang besar. Sebab dengan pengetahuan yang matang, tokoh Hindu baik yang berprofesi sebagai TNI-Polri, Diplomat, ASN maupun berbagai profesi lainnya akan mampu memberikan sumbangsih bagi pertahanan negara.

Referensi

- Avalokitesvari, N. N. A. N., Midhio, W., & Prasetyo, T. B. 2018. *Analysis of State Defense Diplomacy in The Course of Chanakya (Literature Study of Arthashastra as The Basic Strategy for State Defense Diplomacy)*.
- Avalokitesvari, N. N. N., & Midhio, I. W. 2021. *Canakya Arthasastra & Diplomasi Pertahanan*. Paramita.
- Boesche, R. 2003. Kautilya's Arthaśāstra on war and diplomacy in ancient India. *Journal of Military History*. <https://doi.org/10.1353/jmh.2003.0006>
- Chati, C., Avalokitesvari, N. N. A. N., & Surpi, N. K. 2018a. State Defense Diplomacy In Chanakya Viewpoint (Study of Arthashastra Text as a Basis Strategy of Defense Diplomacy). *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.25078/ijhsrs.v2i2.621>
- Chati, C., Avalokitesvari, N. N. A. N., & Surpi, N. K. 2018b. State Defense Diplomacy In Chanakya Viewpoint (Study of Arthashastra Text as a Basis Strategy of Defense Diplomacy). *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*. <https://doi.org/10.25078/ijhsrs.v2i2.621>
- Dellios, R. 2003. Mandala : from sacred origins to sovereign affairs in traditional Southeast Asia. *Centre for East-West Cultural and Economic Studies*.
- Gonda, J., & Kangle, R. P. 1967. The Kautiliya Arthasastra. *Oriens*. <https://doi.org/10.2307/1580465>
- Kangle, R. P. 1986. *The Kautilya Arthashastra, Part 3*. Motilal Banarsidass Publication.
- Karad, S. 2015. Perspectives of Kautilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs. *An International Journal of Humanities and Social Sciences*.
- Rangarajan, L. N. 1992. The Arthashastra. In *The Arthashastra*. Penguin Books India Ltd.
- Ricoeur, P. 2012. *Teori Interpretasi*. IRCiSoD.
- Surpi, N. K. 2019. Moral Politik Dan Merosotnya Kualitas Peradaban Manusia. In I Nyoman Yoga Segara (Ed.), *POLITIK HINDU Sejarah, Moral dan Proyeksinya* (1st ed., p. 58). Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Surpi, N. K. 2021. Universitas Tertua di Dunia dan Relevansinya dengan Pendidikan Tinggi Hindu di Jaman Modern. In *Manajemen Pendidikan Hindu Pendekatan Holistik*. Brillan Internasional.
- Surpi, N. K., Nyoman, N., Nikki, A., Gami, I. M., & Untara, S. 2020. Mandala Theory of Arthaśāstra and Its Implementation Towards Indonesia ' S Geopolitics and Geostrategy. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 4, 179–190.
- Surpi, N. K., Widiana, I. G. P. G., & Wika, I. M. 2021. Indian Logic (*Ānvīkṣikī*) As The Light Of Knowledge And Its Relevance To The Learning Of Hindu Philosophy Nowadays. *Vidyottama Sanatana International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, V(1).

